



- Urusan Pemerintahan Dinas : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
- Kegiatan Sub Kegiatan : **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
: **Administrasi Keuangan**
: **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD**
- Tipe Sub Kegiatan : **Rutin**
- Dukungan terhadap Indikator Program : Menyajikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah bulanan/semesteran
- Sasaran : Penyajian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah bulanan/semesteran
- Output Kegiatan
1. Satuan : Kegiatan
2. Lokasi : Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
- Latar Belakang kondisi existing (lihat KAK) : Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran) dan barang/aset yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA) dan Pengguna Barang (PB). Dengan demikian, penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (*accounting entity*) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (yang mencakup anggaran dan barang, diiringi dengan dana yang dikelola oleh bendahara selaku pejabat fungsional). Pertanggungjawaban atas uang/kas yang ada di SKPD dilakukan oleh bendahara pengeluaran selaku pejabat fungsional (pasal 14 Permendagri 13/2006) keperbendaharaan. Artinya, selain membuat pertanggungjawaban administratif kepada kepala SKPD, bendahara juga menyampaikan pertanggungjawaban fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD). Hal ini sejalan dengan yang

dinyatakan dalam UU 1/2004 tentang perbendaharaan bahwa bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas seluruh pengeluaran yang dilakukannya.

Atas dasar tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari pemerintah berkewajiban atas penyajian Laporan Pertanggungjawaban APBD bulanan/semesteran.

Gambaran Kesenjangan (permasalahan) : -

Lingkup Kegiatan (KAK) :

- a. Maksud dan Tujuan Kegiatan :
 - Menyajikan laporan keuangan SKPD per bulan atau per semester.
 - Menyampaikan pertanggungjawaban fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
- b. Mekanisme / metode pelaksanaan kegiatan :
 - Belanja Langsung
- c. Kebutuhan Waktu : 12 bulan
- d. Siapa yang terlibat : - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Komponen Kegiatan

Kebutuhan operasional kegiatan :

- 1. Kebutuhan Belanja Pegawai : -
- 2. Dukungan Tenaga Ahli / Pakar : - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 3. Koordinasi : - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 4. Tinjauan Lapangan : -

Keluaran/ Output : Tersedianya Laporan Keuangan SKPD Dinas Kominfo Prov.Jateng bulanan/semesteran

Hasil/ Outcome : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan bulanan/semesteran

Kebutuhan Belanja Modal :

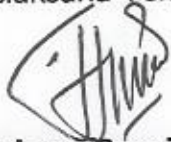
- 1. Kebutuhan / dukungan alat / barang : -
- 2. Pengadaan tanah / lahan : -

Anggaran : Tahun 2022 : Rp. 20.000.000

Rincian kegiatan dan tahapan pelaksanaan : - Setiap bulan (12 bulan)

Semarang, 31 Desember 2021

Disusun oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Genuk Endang Sumiwi, S.IP.,MSi
Pembina (IV/a)
NIP. 19660807 198511 2 001

Diketahui oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen



Hermoyo Widodo, SH,M.Hum
Pembina Tk. I
NIP. 19651021 199403 1 006